

“Korupsi di Papua – kasus Gubernur Papua – Konflik Papua”

Oleh
Theo van den Broek

Sebagaimana diketahui bersama, Papua cukup diguncangkan dengan adanya kasus-kasus korupsi. Kasus yang paling menonjol adalah kasus Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe (LE). Diawali dengan suatu tuduhan terbatas pada penerimaan gratifikasi sebesar 1 miliar, hingga LE dinyatakan menjadi tersangka. Dalam tahap-tahap lanjutan kasus mulai berkembang secara agak liar sampai makin sulit untuk ditangani.

Perkembangan ‘agak liar’ adalah akibat sejumlah faktor yang berikut: [1] reaksi spontan perlawanan kelompok pendukung LE; [2] dugaan adanya permainan kriminalisasi politik; [3] kondisi kesehatan LE yang buruk¹; [4] berita-berita kepada publik luas bahwa LE terlibat dalam korupsi sangat besar sampai ratusan miliar; [5] pemberitaan yang ramai mengenai gaya hidup LE yang sangat mewah, termasuk kunjungannya berkala pada kasino dan pemakaian pesawat jet pribadi; [6] campur tangan [alias intervensi] dari sejumlah pejabat tinggi yang ramai berkomentar kasus korupsi ini. Termasuk Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam), Mahfud, dan Moeldoko (Kepala staf Presiden), dan Waterpauw (penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat); [7] lahirnya polarisasi antara yang pro dan kontra²; [8] pergerakan 1.600 personel keamanan di sekitar kediaman LE (untuk sebagian Brimob dari luar Papua: Maluku dan Sulawesi Utara); [9] ramainya kunjungan pada LE; termasuk Komnas HAM, Kepala BIN Papua, Tokoh-tokoh agama, Tokoh-tokoh HAM, Tokoh-tokoh Adat; [10] LE dinobatkan oleh Dewan Adat pimpinan Sorabut menjadi ‘kepala suku besar Papua’; [11] desakan Tim Kuasa Hukum LE supaya kasus ditangani sesuai ‘hukum adat Papua’ dan diselesaikan di Jayapura saja; KPK menolak pendekatan sejenis itu; [12] peluang panggilan ke-tiga oleh KPK; kalau tidak dipenuhi, akan disusul aksi ‘dijemput paksa’ dan [13] tambahnya terus kelompok dukungan, penjaga kediamannya yang untuk sebagian dilengkapi dengan alat-alat tajam. Pendek kata: keadaan menjadi makin rumit, kompleks dan mengandung potensi tindakan kekerasan. Dalam kelanjutan penanganan kasus korupsi LE, seorang anggota Tim Pengacara meminta supaya kasus ini diusut secara adat. Alasannya: pada 8 Oktober sudah dinobatkan sebagai “Kepala Suku Besar Papua”. “Perkara diselesaikan saja di depan mata banyak orang, secara publik dan sesuai peraturan adat”, demikianlah saran pengacara, Alo Renwarin³. KPK menolak pendekatan melalui hukum adat ini⁴.

Sementara waktu para Juru bicara LE menekankan bahwa LE tetap bersedia menghadapi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sesaat dia sudah pulih kesehatannya. Sejumlah pemantau membenarkan bahwa kondisi kesehatan LE memang buruk dan bukan alasan

¹ <https://regional.kompas.com/read/2022/10/11/074349678/cek-kesehatan-lukas-enembe-dokter-asal-singapura-tiba-di-jayapura>

² <https://www.kompas.tv/article/335212/komunitas-masyarakat-papua-gelar-demo-dukung-kpk-jemput-paksa-lukas-enembe> dan <https://www.kompas.tv/article/335342/dorong-lukas-enembe-klarifikasi-ke-kpk-ketua-adat-waris-masyarakat-papua-tidak-boleh-intervensi?page=all>

³ <https://news.detik.com/berita/d-6339823/pengacara-klaim-warga-papua-minta-kasus-lukas-enembe-diusut-secara-adat>

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6343780/respons-lukas-enembe-diminta-tak-bawa-bawa-hukum-adat-di-kasus-korupsi>

buatan. Mereka menekankan supaya perhatian prioritas perlu diberikan kepada unsur kesehatan dulu di atas segala pertimbangan. Seruan senada dilontarkan para tokoh agama dan tokoh HAM⁵.

Sampai saat ini beliau dua kali dipanggil dan dua kali panggilan ini tidak dipenuhi karena alasan kesehatannya tidak memungkinkan. Alasan ini cukup diragukan oleh pelbagai instansi di Jakarta, dan mereka menekankan bahwa kalau dalam keadaan sakit, tetap alangkah baiknya untuk dibawa ke Jakarta untuk diobati di Jakarta. Perawatan medis yang tepat dijamin oleh KPK mendahului pemeriksaan lanjut. Sebenarnya LE ingin dirawat di luar negeri (Singapura atau Philippina) dimana dia sudah pernah dirawat. Namun hal demikian tidak dapat dijalankan karena LE sudah berstatus 'dicekal', artinya dilarang pergi ke luar negeri. LE tidak mau dirawat di Jakarta. Kemungkinan besar bahwa penolakan itu, bukan karena perawatan medis di Jakarta dinilainya di bawah standar, melainkan karena beliau (serta pendukungnya) sama sekali tidak percaya kepada keikhlasan para pejabat di Jakarta. Kepercayaan pada 'Jakarta' sudah nol, malahan dikhawatirkan bahwa kesempatan itu hanya akan dipakai untuk – sekurang-kurangnya – menggeser beliau dari kedudukan sebagai gubernur.

Sementara waktu KPK memutuskan untuk mengirim 'tim dokter independen' bersama tenaga penyidik KPK untuk suatu pemeriksaan awal di Jayapura saja (rencana akhir Oktober). Maka, panggilan ketiga ditunda saja dan kemungkinan penjemputan paksa dihindari. Kunjungan gabungan Tim Dokter bersama KPK akan dikawal oleh 1.800 personil keamanan, ujanya Kapolda Papua. 'Kubu Lukas Enembe' sudah menyatakan bahwa akan menerima kunjungan gabungan itu dengan baik dan dengan sikap kooperatif.

Faktor dugaan kriminalisasi tetap kuat. Kekuatiran LE bahwa beliau akan digeser dari kedudukannya sebagai Gubernur Provinsi Papua mempunyai kaitan langsung dengan beberapa peristiwa di masa lampau. Para pendamping LE terus mengingatkan kita akan dua momen upaya nyata untuk 'mengontrol Lukas'. Yang pertama sewaktu menjelang pemilu lalu LE didesak oleh pejabat tinggi untuk memilih Waterpauw [mantan Kapolda Papua] sebagai 'pasangannya'. Katanya, baik Kapolri (Karnavian), Kepala BIN (Gunawan) maupun Waterpauw terlibat dalam upaya 'mengontrol Lukas Enembe' itu. LE menolak secara bulat. Momen kedua sewaktu wakil Gubernur (Wagub) provinsi Papua meninggal dunia dan kursi Wagub kosong. Pada saat itu pun LE didatangkan di kediamannya oleh beberapa pejabat tinggi (termasuk Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian) untuk mengisi kursi wakil Gubernur dengan calon yang mereka sarankan, yakni Waterpauw. Sekali lagi LE menolak secara bulat. Tercatat juga berita bahwa belum lama ini LE didesak Kementerian Dalam Negeri untuk menyediakan jumlah dana sangat substantial dari anggaran provinsinya untuk membiayai pendirian tiga provinsi yang baru di Papua. Menurut beritanya, LE kurang setuju dengan permintaan itu. Pokoknya, para pendukung LE berpendapat bahwa 'Jakarta' kurang senang dengan kepemimpinan LE dan terus berupaya menggesernya dari kursi gubernur. Maka diduga bahwa sekarang ini adalah upaya penggeseran ketiga dengan melontarkan tuduhan korupsinya. Latar belakang ini pasti turut mendorong LE untuk menunda keberangkatan ke Jakarta sedapat mungkin, termasuk untuk menerima perawatan di Jakarta.

⁵ <https://www.ucanews.com/news/catholic-activists-stand-up-for-graft-accused-papua-governor/99022>

Keyakinan akan adanya suatu agenda politik di belakang tuduhan korupsi pada LE, hanya diperkuat lagi sewaktu a.l. Menkopolkam, Mahfud, mengangkat kasus korupsi LE secara besar-besaran dengan melibatkan pejabat lainnya, a.l. dari KPK dan Keuangan. Dalam konferensi pers itu pejabat KPK dan Keuangan menjelaskan besarnya korupsi yang dikaitkan dengan LE. Dijelaskan adanya 'indikasi' atau 'dugaan' korupsi yang sangat besar! Memang, sangat mengagetkan bahwa Menkopolkam secara langsung mengangkat hal itu, daripada membiarkan KPK menangani kasus ini dan menjaga independensinya. Apalagi penelitian korupsi LE masih berjalan, belum sampai pembuktian, hanya 'dugaan' dan 'indikasi'. Kebijakan Mahfud sangat diragukan.

Adanya 'tuduhan kriminalisasi' yang juga dikaitkan dengan gerak-gerik Waterpauw yang baru ini diangkat oleh Tito Karnavian (Mendagri) sebagai pejabat Gubernur di provinsi Papua Barat. Waterpauw sendiri mengangkat suaranya secara vokal dan kurang proporsional (a.l. menyindir LE karena gaya hidupnya) sampai mendorong 'sesama asli orang Papua' ini untuk mundur saja dari kursi gubernur. Sekaligus Waterpauw merasa nama baiknya dicemarkan oleh tim kuasa hukum LE dan melaporkan ketua tim itu pada polisi. Sudah tentu, tindakan ini hanya memanas kubu pendamping LE dan menunjukkan kekurangpahaman Waterpauw mengenai situasi eksplosif yang telah berkembang.

Dalam dinamika 'tukar menukar pendapat sekitar kasus korupsi ini', sebenarnya perhatian makin bergeser dari soal korupsi sebagai sesuatu yang patut ditangani secara hukum dan melalui jalur yang lazimnya dipakai, yakni KPK. Fokusnya makin bergeser ke arah 'politik umum', hingga kasus LE menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa 'kami orang Papua sudah jenuh dengan segala manipulasi Jakarta, termasuk para pemain kuasa dan para penggeraknya'. Bukan substansi korupsi ini masih menjadi fokus utama, namun cara pemerintah pusat menilai dan memberlakukan bangsa Papua! *Ada omongan seperti berikut: 'Jakarta mau apa? Indonesia sudah mencuri apa saja di Papua, tanahnya, kekayaan alamnya, martabat orangnya, dan kami dibunuh saja. Dibanding dengan itu apa yang mungkin dipakai oleh LE hanya sangat sedikit saja, tidak ada arti.'* Omongan senada itu makin sering terdengar. Reaksi demikian sebaiknya mengingatkan kita semua pada frustrasi besar yang masyarakat Papua sudah alami selama bertahun-tahun. Pengalaman bahwa hak dan jati dirinya dirampas bukan di masa lampau (sejarah kolonial) saja, melainkan sampai saat ini. Sejarah terulang terus! Mengingat juga pengalaman baru ini sewaktu suara mereka tidak mau didengar dan segala macam keputusan diambil segelintir orang berkuasa di 'Jakarta' tanpa mau pusing dengan kepentingan bangsa Papua atau tanpa mengizinkan partisipasi rakyatnya secara bermakna. Segala gaya manipulasi selama bertahun-tahun sampai dalam lembaga DPR RI dengan mengesahkan UU Otsus Jilid II dan UU Pemekaran Papua, hanya menambahkan rasa dendam dalam hati banyak orang, dan memang tidak tanpa alasan. Pengalaman pahit bahwa 'tidak diakui sebagai 'manusia yang bermartabat' dan sebagai 'anak sulung' yang memiliki hak-hak sebagai penghuni asli Papua, baik di masa lampau mau dewasa ini, menjadi beban hidupnya, dan membawa serta penderitaan yang tidak dipedulikan para penguasa. Akhirnya apa yang dimulai sebagai suatu 'kasus korupsi' telah berkembang menjadi suatu 'soal politik yang panas', menjadi 'ungkapan konflik utama' yang sampai saat ini kurang mau diselesaikan oleh pemerintah di Indonesia. Bukan korupsi uang menjadi fokus, 'itulah hal sepele saja', melainkan pengakuan martabat dan hak orang Papua menjadi fokus utama. Sudah terlalu lama pemerintah Indonesia menolak melihat inti konflik yang sebenarnya.

